

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta, berperan strategis terhadap perekonomian Indonesia. DKI Jakarta berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang terbesar dibanding provinsi lain, yakni sekitar 17% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dan pada tingkat inflasi DKI Jakarta mempunyai kontribusi sebesar 20% terhadap inflasi nasional yang terbesar dibanding provinsi lainnya. Oleh karena itu, pengaruh terhadap perkembangan perekonomian yang besar dimiliki oleh DKI Jakarta membuat BI perlu menjaga dan mengawasi stabilitas nilai rupiah agar tetap stabil. Bank Indonesia melihat bahwa pentingnya sebuah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi dari BI.



Gambar 2.1. Logo Bank Indonesia (BI)

Pada tanggal 22 Juni 2015 salah satu dari 34 kantor perwakilan yang ada di Indonesia didirikan, yaitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang bertepatan dengan HUT DKI Jakarta yang ke-488. KPw BI DKI Jakarta memiliki peran penting dalam membantu analisis ekonomi Provinsi DKI, karena bagi Pemerintah Daerah (Pemda), setiap sedikit pun dana yang dikeluarkan harus memiliki dampak bagi masyarakat DKI Jakarta. KPw BI Jakarta menjadi 17 kolaborasi yang baik bagi Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam memberi masukan analisis dalam hal pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah. Selain itu, KPw BI DKI Jakarta akan bertugas dalam mendukung upaya

reformasi struktural, memelihara stabilitas sistem keuangan (regional financial surveillance), pengumpulan data untuk pengambilan keputusan di pusat maupun daerah setempat, dan mengkomunikasikan kebijakan BI. KPw BI DKI Jakarta juga mendukung penyusunan kebijakan maupun Peraturan Daerah (Perda) yang dapat menimbulkan dampak bagi perekonomian, melalui pembuatan kajian dan analisis terkait dengan dampak kebijakan. Selain itu, KPw BI DKI Jakarta juga akan mendukung berbagai inisiatif BI yang sedang berjalan, seperti kegiatan terkait peningkatan akses keuangan dan elektronifikasi.

2.1.1 Visi

Menjadi kantor perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

2.1.2 Misi

- Menjaga stabilitas nilai rupiah.
- Menjaga stabilitas sistem keuangan.
- Efektivitas pengelolaan uang rupiah.
- Kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung Pembangunan ekonomi.

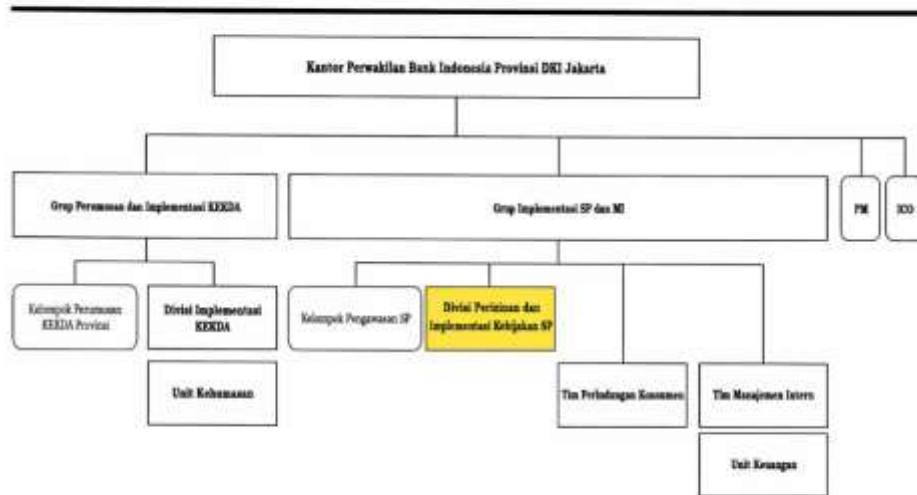
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala KPw BI DKI Jakarta. Di bawah pimpinan terdapat dua grup utama, yakni Grup Perumusan dan Implementasi KEKDA (Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah) yang menaungi Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi, Divisi Implementasi KEKDA, serta Unit Kehumasan; dan Grup Implementasi Sistem Pembayaran (SP) dan Manajemen Intern (MI) yang membawahi Kelompok Pengawasan SP, Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan SP, Tim Perlindungan Konsumen, serta Tim Manajemen Intern dengan Unit Keuangan di bawahnya. Selain itu ada dua unit khusus PM dan ICO yang berada di luar rantai komando grup dan melapor langsung kepada pimpinan. Susunan ini membagi peran antara perumusan/implementasi kebijakan daerah dan pengawasan-operasional SP

serta pengelolaan internal, sambil memastikan fungsi komunikasi publik, perlindungan konsumen, dan administrasi keuangan berjalan terkoordinasi.

A. STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA



Gambar 2.2 Struktur Organisasi & Kedudukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

2.3 Produk/Jasa Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia menyediakan berbagai produk dan jasa yang dirancang untuk mendukung stabilitas moneter, kelancaran sistem pembayaran, serta ketahanan sistem keuangan nasional. Produk dan jasa tersebut tidak bersifat komersial seperti lembaga keuangan pada umumnya, melainkan terfokus pada pelayanan publik, pengaturan, dan pengawasan yang menjadi mandat utama berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia. Secara garis besar, produk dan jasa Bank Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang utama, yaitu sistem pembayaran, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Pada bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia menyediakan infrastruktur, regulasi, serta layanan yang memastikan transaksi keuangan dapat berlangsung aman, efisien, cepat, dan terpercaya. Salah satu produk utama pada bidang ini adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yaitu standar nasional

kode QR yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran dengan satu kode universal di seluruh merchant yang bekerja sama dengan berbagai penyelenggara jasa pembayaran. QRIS menjadi tonggak penting percepatan digitalisasi transaksi ritel di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga mengembangkan BI-FAST, yaitu infrastruktur pembayaran ritel yang memungkinkan transfer dana antar bank secara cepat, aman, dan berbiaya rendah selama 24 jam dalam 7 hari. Pada transaksi bernilai besar, Bank Indonesia menyediakan BI-RTGS (Real-Time Gross Settlement) yang memfasilitasi penyelesaian transaksi antar bank secara real-time, serta BI-SSSS (Scripless Securities Settlement System) yang memproses transaksi surat berharga secara elektronik. Di luar itu, Bank Indonesia juga menyediakan layanan pengedaran dan pengolahan uang rupiah, termasuk penukaran uang rusak dan pengendalian kualitas uang melalui program edukasi “Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah”. Produk dan jasa sistem pembayaran juga mencakup fungsi pengawasan terhadap berbagai penyelenggara jasa pembayaran, seperti perusahaan KUPVA BB, BB UKA, dompet digital, payment gateway, hingga merchant acquirer. Pengawasan ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan serta menjaga keamanan transaksi masyarakat.

Pada bidang kebijakan moneter, produk dan jasa Bank Indonesia berfokus pada instrumen-instrumen yang digunakan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Produk kebijakan utama di bidang ini adalah BI-Rate atau suku bunga kebijakan, yang menjadi acuan penting dalam pergerakan suku bunga pasar uang dan perbankan. Selain itu, Bank Indonesia melaksanakan Operasi Pasar Terbuka (OPT) sebagai mekanisme lelang instrumen moneter seperti surat berharga atau deposito bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar. Bank Indonesia juga menyediakan Standing Facilities, yaitu fasilitas simpanan dan pinjaman yang membantu perbankan dalam mengelola likuiditas harian. Keseluruhan produk dan jasa ini memungkinkan bank sentral menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi melalui pengendalian moneter yang efektif.

Pada bidang stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menyediakan berbagai produk dan jasa berupa kebijakan, koordinasi, dan publikasi data ekonomi yang mendukung pemantauan risiko sistem keuangan secara makro. Produk pada bidang ini mencakup kebijakan makroprudensial, yang bertujuan menjaga ketahanan sistem keuangan dengan mengatur likuiditas, intermediasi, dan eksposur risiko lembaga keuangan secara sistemik. Selain itu, Bank Indonesia juga menghasilkan beragam survei dan publikasi resmi, seperti Survei Konsumen, Survei Kegiatan Dunia Usaha, Statistik Sistem Pembayaran, serta Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Publikasi tersebut menjadi acuan penting bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun lembaga internasional dalam memahami dinamika ekonomi Indonesia. Pada sisi layanan publik, Bank Indonesia juga menyediakan layanan edukasi, pengaduan konsumen terkait sistem pembayaran, serta inisiatif digitalisasi UMKM melalui program-program yang mendukung inklusi ekonomi dan keuangan.

Secara keseluruhan, produk dan jasa yang disediakan Bank Indonesia mencerminkan fungsi strategisnya sebagai bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter, kelancaran sistem pembayaran, dan ketahanan sistem keuangan. Seluruh layanan tersebut dirancang untuk mendukung sistem perekonomian yang sehat, efisien, dan inklusif, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan aktivitas ekonomi. Produk dan jasa tersebut juga menjadi fondasi penting yang memungkinkan Bank Indonesia menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.